

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Teori - Teori**

##### **1. Akuntansi Pertanggung Jawaban**

Pengertian Akuntansi Pertanggung Jawaban

Seorang pimpinan diharapkan mampu memantau seluruh kegiatan operasi perusahaannya secara langsung. Namun, semakin kompleksnya kegiatan suatu perusahaan menyebabkan pimpinan tak lagi mampu memantau seluruh kegiatan perusahaan secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab melalui penerapan akuntansi pertanggung jawaban. Dengan akuntansi pertanggung jawaban, pimpinan dapat mengendalikan tanggung jawab tiap unit kerja atau pusat pertanggung jawaban.

Ada beberapa pendapat mengenai definisi akuntansi pertanggung jawaban, antara lain dikemukakan oleh Hansen dan Mowen (2009:229) adalah sebagai berikut :

Akuntansi pertanggung jawaban adalah alat fundamental untuk pengendalian manajemen dan ditentukan melalui empat elemen penting, yaitu pemberian tanggung jawab, pembuatan ukuran kinerja atau benchmarking, pengevaluasian kinerja, dan pemberian penghargaan. Akuntansi pertanggung jawaban bertujuan memengaruhi perilaku dalam cara tertentu sehingga seseorang atau kegiatan perusahaan akan disesuaikan untuk mencapai tujuan bersama.

Sedangkan menurut Mulyadi (1997:188) definisi akuntansi pertanggung jawaban adalah :

Akuntansi pertanggung jawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan serta pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggung jawaban dalam organisasi, dengan

tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya dan / atau pendapatan yang dianggarkan.

Berdasarkan pendapat - pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pertanggung jawaban adalah suatu sistem yang membandingkan rencana (anggaran) dengan tindakan (hasil sesungguhnya) dari setiap pusat pertanggung jawaban yang digunakan untuk mengukur kinerja seseorang dan / atau suatu departemen dalam pencapaian tujuan perusahaan.

#### Karakteristik Akuntansi Pertanggung Jawaban

Menurut Mulyadi (1997:186), yaitu :

- a. Adanya identifikasi pusat pertanggung jawaban.

Akuntansi pertanggung jawaban mengidentifikasi pusat pertanggung jawaban sebagai unit organisasi seperti departemen, keluarga produk, tim kerja, atau individu. Apapun satuan pusat pertanggung jawaban yang dibentuk, sistem akuntansi pertanggung jawaban membebaskan tanggung jawab kepada individu yang diberi wewenang. Tanggung jawab dibatasi dalam satuan keuangan (seperti biaya).

- b. Standar ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggung jawaban tertentu.

Setelah pusat pertanggung jawaban diidentifikasi dan ditetapkan, sistem akuntansi pertanggung jawaban menghendaki ditetapkannya biaya standar sebagai dasar untuk menyusun anggaran. Anggaran berisi biaya standar yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Biaya standar dan anggaran merupakan ukuran kinerja manajer pusat

pertanggung jawaban dalam mewujudkan sasaran yang ditetapkan dalam anggaran.

- c. Kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran.

Pelaksanaan anggaran merupakan penggunaan sumber daya oleh manajer pusat pertanggung jawaban dalam mewujudkan sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. Penggunaan sumber daya ini diukur dengan informasi akuntansi pertanggung jawaban, yang mencerminkan ukuran kinerja manajer pusat pertanggung jawaban dalam mencapai sasaran anggaran. Dengan informasi akuntansi pertanggung jawaban, secara prinsip individu hanya diminta pertanggung jawaban atas biaya yang ia memiliki wewenang untuk mempengaruhinya secara signifikan. Informasi akuntansi pertanggung jawaban menyajikan informasi biaya sesungguhnya dan informasi biaya yang dianggarkan kepada setiap manajer yang bertanggung jawab, untuk memungkinkan setiap manajer mempertanggung jawabkan pelaksanaan anggaran mereka dan memungkinkan mereka untuk memantau pelaksanaan anggaran mereka.

- d. Manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi.

Sistem penghargaan dan hukuman dirancang untuk memacu para manajer dalam mengelola biaya - untuk mencapai target standar biaya yang dicantumkan dalam anggaran. Atas dasar evaluasi penyebab terjadinya penyimpangan biaya yang direalisasikan dari biaya yang

dianggarkan, para manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman menurut sistem penghargaan dan hukuman yang ditetapkan.

#### Manfaat Informasi Akuntansi Pertanggung Jawaban

Informasi akuntansi pertanggung jawaban merupakan aset, pendapatan dan / atau biaya yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap pusat pertanggung jawaban tertentu. Informasi ini dapat berupa informasi historis yang berupa aset, pendapatan dan / atau biaya masa lalu, dan dapat pula berupa informasi masa yang akan datang. Informasi pertanggung jawaban yang berupa informasi masa yang akan datang bermanfaat untuk penyusunan anggaran. Sedangkan informasi akuntansi pertanggung jawaban yang berupa informasi masa lalu bermanfaat sebagai (Mulyadi, 1997:33)

“a. Penilai kinerja manajer pusat pertanggung jawaban.

b. Pemotivasi manajer.”

## 2. Pusat Pertanggung Jawaban

### Pengertian Pusat Pertanggung Jawaban

Dalam organisasi perusahaan, penentuan daerah pertanggung jawaban dan manajer yang bertanggung jawab dilaksanakan dengan menetapkan pusat - pusat pertanggung jawaban dan tolok ukur kinerjanya (Diana Putri, 2005).

Definisi pusat pertanggung jawaban menurut Hansen dan Mowen (2009:560) adalah :

“Pusat pertanggung jawaban (responsibility center) merupakan suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan -



kegiatan tertentu.” Menurut Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan (2009:171) pusat pertanggung jawaban adalah “organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan.”

Dapat disimpulkan bahwa pusat pertanggung jawaban merupakan suatu unit dari organisasi yang dikepalai oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap hasil dari aktivitas yang dilakukan oleh unit tersebut.

Jenis - jenis Pusat Pertanggung Jawaban

Dalam organisasi perusahaan, penentuan daerah pertanggung jawaban dan manajer yang bertanggung jawab dilaksanakan dengan menetapkan pusat - pusat pertanggung jawaban dan tolok ukur kinerjanya. Suatu pusat pertanggung jawaban dapat dipandang sebagai suatu sistem yang mengolah masukan menjadi keluaran. Masukan suatu pusat pertanggung jawaban yang dinyatakan dalam satuan uang disebut dengan pendapatan.

Hubungan antara masukan dan keluaran suatu pusat pertanggung jawaban mempunyai karakteristik tertentu. Hampir semua masukan suatu pusat pertanggung jawaban dapat diukur secara kuantitatif, namun tidak semua keluaran pusat pertanggung jawaban dapat diukur secara kuantitatif.

Ada empat jenis pusat pertanggung jawaban, digolongkan menurut sifat input dan / atau output moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian (Anthony dan Govindarajan, 2009) :

a. Pusat pendapatan

Di pusat pendapatan, suatu output (yaitu, pendapatan) diukur secara moneter, akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input (yaitu, beban atau biaya) dengan output. Pada umumnya, pusat pendapatan merupakan unit pemasaran/penjualan yang tak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok

penjualan dari barang - barang yang mereka pasarkan. Penjualan atau pesanan aktual diukur terhadap anggaran dan kuota, dan manajer dianggap bertanggung jawab atas biaya yang terjadi secara langsung di dalam unitnya, akan tetapi ukuran utamanya adalah pendapatan.

b. Pusat biaya

Pusat biaya adalah pusat pertanggung jawaban yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Pusat biaya (*cost center*), manajer departemen atau divisi diserahi tanggung jawab untuk mengendalikan biaya yang dikeluarkan dan otoritas untuk mengambil keputusan - keputusan yang mempengaruhi biaya tersebut. Pusat biaya merupakan jenis pusat pertanggung jawaban yang digunakan secara luas. Hal ini karena bidang - bidang di mana manajer mempunyai tanggung jawab dan otoritas atas biaya dapat diidentifikasi dengan cepat pada sebagian besar perusahaan. Besar atau kecilnya pusat biaya tergantung pada aktivitasnya.

Manajer pusat biaya perlu memastikan bahwa tugas - tugas yang diembannya dituntaskan dalam batasan yang diperkenankan oleh anggaran atau biaya standar. Manajer pusat biaya memakai biaya standar dan anggaran yang fleksibel untuk mengendalikan biaya. Apabila selisih dari standar bersifat signifikan, manajemen haruslah menginvestigasi aktivitas - aktivitas pusat biaya dalam upaya menentukan apakah biaya di luar kendali, atau sebaliknya, standar biayanya yang memang perlu direvisi. Manajer pusat biaya tidak membuat keputusan menyangkut penjualan ataupun jumlah aset tetap yang diinvestasikan pada pusat biaya tersebut.

Kinerja pusat biaya terutama diukur berdasarkan efisiensi dan mutu. Kendatipun demikian, minimisasi biaya mungkin saja dilakukan dengan mengorbankan mutu dan volume produksi sehingga mengakibatkan tidak adanya keharmonisan dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Untuk menanggulangi tendensi ini perlu ditetapkan jenis dan banyaknya produksi yang dikehendaki serta standar mutu yang diisyaratkan.

Terdapat dua cara beroperasinya pusat biaya. Beberapa pusat biaya diberikan sejumlah biaya tetap sumber daya (anggaran) dan diminta menghasilkan sebanyak mungkin keluaran dari sejumlah sumber daya tersebut. Pengelolaan pusat biaya lainnya adalah dengan meminimalkan biaya - biaya seraya menghasilkan suatu kuantitas keluaran tertentu. Oleh karena itu, mutu produk yang diproduksi dalam pusat - pusat biaya harus dipantau.

Ada dua jenis umum dari pusat biaya, yaitu :

1) Pusat biaya teknik.

Pusat biaya teknik memiliki ciri - ciri sebagai berikut :

1. Input - inputnya dapat diukur secara moneter.
2. Input - inputnya dapat diukur secara fisik.
3. Jumlah dolar optimum dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit output dapat ditentukan.

2) Pusat biaya kebijakan.

Pusat biaya kebijakan meliputi unit - unit administratif dan pendukung (seperti, akuntansi, hukum, hubungan industrial, hubungan masyarakat,

sumber daya manusia), operasi litbang, dan hampir semua aktivitas pemasaran. Output dari pusat biaya ini tidak bisa diukur secara moneter.

c. Pusat laba

Ketika kinerja finansial suatu pusat pertanggung jawaban diukur dalam ruang lingkup laba (yaitu, selisih antara pendapatan dan biaya), maka pusat ini disebut sebagai pusat laba (*profit center*). Laba merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan manajemen senior untuk dapat menggunakan satu indikator yang komprehensif, dibandingkan jika harus menggunakan beberapa indikator (beberapa di antaranya menunjuk ke arah yang berbeda).

Manajer pusat laba diukur kinerjanya dari selisih antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Oleh karena itu dalam pusat laba, masukan maupun keluarannya diukur dalam satuan rupiah untuk menghitung laba yang dipakai sebagai pengukur kinerja manajernya. Suatu pusat pertanggung jawaban merupakan pusat laba jika manajemen puncak menghendaki untuk mengukur keluaran pusat pertanggung jawaban tersebut dalam satuan rupiah dan manajer pusat pertanggung jawaban tersebut diukur kinerjanya atas dasar selisih antara pendapatan dengan biayanya.

d. Pusat investasi

Di unit usaha yang lain, laba dibandingkan dengan aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Pusat pertanggung jawaban ini disebut sebagai pusat investasi. Ukuran prestasi manajer pusat investasi dapat berupa rasio antara laba dengan investasi yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut.

#### Syarat - Syarat Penerapan Akuntansi Pertanggung Jawaban

Menurut Mulyadi (dikutip oleh Diana Putri, 2005), untuk dapat diterapkannya sistem akuntansi pertanggung jawaban ada lima syarat, yaitu :

1. Struktur organisasi yang menetapkan secara tegas wewenang dan tanggung jawab tiap tingkatan manajemen.
2. Anggaran biaya yang disusun untuk tiap tingkatan manajemen.
3. Penggolongan biaya sesuai dengan dapat dikendalikan tidaknya (controllability) biaya oleh manajemen tertentu dalam operasi.
4. Terdapatnya susunan kode rekening perusahaan yang dikaitkan dengan kewenangan pengendalian pusat pertanggung jawaban.

5. Sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggung jawab (responsibility reporting).

### Struktur Organisasi

Dalam membahas sistem akuntansi pertanggung jawaban, informasi akuntansi selalu dihubungkan dengan wewenang yang dimiliki oleh tiap - tiap manajer yang ada dalam perusahaan, oleh karena itu setiap manajer di dalam organisasi harus bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang berada di bawah pengendaliannya. Dengan kata lain, manajer yang disertai wewenang dari pimpinan perusahaan harus mempertanggung jawabkan kinerjanya pada pimpinan perusahaan tersebut. Perusahaan sebagai suatu organisasi harus memiliki struktur organisasi yang disusun sedemikian rupa sehingga wewenang dan tanggung jawab setiap manajer menjadi lebih jelas.

## **3. Pendapatan**

### **a. Pengertian Tentang Pendapatan**

Setiap perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai suatu tujuan untuk menghasilkan laba sesuai yang diinginkan, maka untuk menghasilkan suatu laba yang maksimal tidak terlepas dari masalah pengakuan pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dalam melakukan usahanya. Pendapatan sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan aktivitas perusahaan. Tidak semua kenaikan dari aset dapat disebut sebagai pendapatan, dimana kegiatan utama yang berlanjut merupakan karakteristik yang membatasi kenaikan aset sebagai pendapatan. Menurut karakteristik operasi utama berlanjut, pendapatan merupakan produk



perusahaan yang dihasilkan sebagai upaya produktif. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan bisa diklasifikasikan sebagai pendapatan operasi dan non operasi.

Beberapa sumber yang menjelaskan mengenai definisi dari pendapatan, para ahli akuntansi mempunyai penafsiran yang berbeda dari pendapat yang sering dikaitkan dengan prosedur akuntansi tertentu, definisinya sebagai berikut :

Menurut Syafri (2000 : 134) mendefinisikan “Revenue ..... inflow or other enhancements of assets of an entity or settlement of its liabilities (or a combination of both) during a period from delivering or producing good, rendering services or other activities that constitutes the entity’s on going operation”. Definisi ini mendasarkan pada inflow konsep dengan menyatakan bahwa pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan aktiva atau penyelesaian kewajiban akibat produksi barang dan jasa.

Menurut Belkaoui (2006:278) “Pendapatan telah diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Arus masuk aktiva bersih yang dihasilkan dari penjualan barang atau jasa.
2. Arus keluar barang atau jasa dari perusahaan kepelanggannya.
3. Produk perusahaan yang dihasilkan dari penciptaan barang atau jasa oleh usaha selama periode waktu tertentu.”

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 23 (2007:23.2) Pendapatan adalah “Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas - aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal”.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004 : Par.06,hlm.23.3) No.23 sebagai berikut : “Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.

Selain itu pengertian pendapatan menurut Sofyan Safri Harahap (2004:128-137) adalah pada umumnya revenue telah ditafsirkan sebagai :

1. Arus masuk net asset sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa.
2. Arus keluar barang dan jasa dari perusahaan kepada pelanggan.
3. Produksi perusahaan sebagai akibat dari semata - mata penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan selama periode.

Pendapatan timbul karena pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, deviden, royalty dan sewa. Pendapatan merupakan faktor terpenting untuk mendapatkan laba oleh sebab itu penentuan pendapatan harus dilakukan dengan tepat agar benar - benar mencerminkan hasil usaha dalam suatu periode.

Konsep pendapatan selalu menjadi pusat perhatian yang terpenting dari para ekonom. Perlu diketahui bahwa salah satu sumber yang utama dari pendapatan adalah penjualan. Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang pendapatan harus sesuai dengan prinsip konservatif. Definisi pendapatan sebagai produk perusahaan tidak menentukan besarnya pendapatan ataupun waktu penetapan pendapatan itu sendiri. Umumnya pendapatan dinyatakan dengan satuan uang yang diperoleh perubahan tingkat harga.

Namun definisi pendapatan ini tidak mengharuskan pengukuran dengan cara tersebut, ukuran apapun yang dipakai tidak akan mengubah sifat dasar pendapatan itu.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan mengenai pendapatan sebagai berikut :

a) Pendapatan dalam arti sempit :

Pendapatan berasal dari kegiatan pokok perusahaan dengan menciptakan barang atau jasa yang selanjutnya ditransfer kepada pelanggan dalam suatu periode tertentu. Jadi dipisahkan antara pendapatan yang berasal dari kegiatan pokok perusahaan dengan yang berasal dari kegiatan diluar kegiatan pokok perusahaan.

b) Pendapatan dalam arti luas :

Pendapatan berasal dari kegiatan pokok perusahaan dan kegiatan diluar usaha pokok perusahaan.

**b. Pengakuan Pendapatan**

Kaidah pengakuan pendapatan merupakan ketentuan pada level penetapan standar. Agar dapat dilaksanakan pada level perusahaan maka kaidah tersebut harus dijabarkan secara teknis dan prosedur dalam bentuk kebijakan akuntansi perusahaan. Kebijakan akuntansi perusahaan yang menetapkan kapan suatu penjualan dianggap secara teknis telah terjadi sehingga memicu pencatatan jumlah rupiah penjualan tersebut.

Pengakuan merupakan proses secara formal pencatatan jumlah rupiah pendapatan dan memasukan suatu pos dalam akun serta laporan keuangan entitas. Pengakuan meliputi penjelasan suatu pos baik dengan kata - kata maupun angka serta jumlah itu termasuk dalam angka total laporan keuangan. Oleh karena itu secara konseptual pendapatan dapat diukur jika memenuhi kualitas pengukuran dan keandalan maka kualitas tersebut harus dioperasikan dalam bentuk kriteria pengakuan pendapatan.

Pembentukan pendapatan merupakan konsep yang berkaitan dengan masalah kapan dan bagaimana sesungguhnya pendapatan itu timbul dan menjadi ada, konsep ini menyatakan bahwa pendapatan terbentuk bersamaan dengan melekat pada totalitas proses berlangsungnya operasi perubahan sedangkan konsep realisasi menjelaskan pendapatan terjadi pada saat produk selesai dikerjakan dan terjual langsung atas dasar kontrak penjualan.

Berkaitan dengan pernyataan diatas dan menurut Donal E Kiesso, dkk (2002:3) ada beberapa yang perlu diketahui tentang prinsip pengakuan pendapatan yang menyatakan “pendapatan harus diakui dalam laporan keuangan ketika :

1. Pendapatan dihasilkan.  
Dimana bila entitas secara substantial telah menyelesaikan proses pendapatan pada umumnya barang telah dikirim atau jasa yang diberikan.
2. Pendapatan direalisasi atau dapat direalisasi.  
Bila barang atau jasa ditukar dengan kas dan kesanggupan untuk membayar kas aktiva lain yang dapat ditukar dengan kas.  
Kriteria pengakuan pendapatan ketika :
  - a) Bukti yang menyakinkan adanya surat perjanjian jual beli.
  - b) Pengiriman telah dilakukan atau jasa telah diberikan.
  - c) Harga jual sudah ditentukan.
  - d) Kolektibilitas dapat dijamin dengan memadai.
 Beberapa transaksi pendapatan yang dapat direalisasi dan telah diakui sesuai dengan prinsip sebagai berikut :
  - a) Pendapatan dari transaksi penjualan produksi diakui pada tanggal penjualan produksi kepada pelanggan.
  - b) Pendapatan atas jasa yang diberikan oleh perusahaan jasa diakui pada saat jasa tersebut telah diakui.
  - c) Imbalan yang diperoleh atas penggunaan aktiva atau sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain.
  - d) Pendapatan dari penjualan aktiva selain produk diakui pada tanggal penjualan”.

Pendapatan dapat diukur dalam satuan nilai tukar produk atau jasa yang dipertukarkan dalam transaksi wajar. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia juga menganut prinsip mengukur pendapatan dimana pendapatan harus diukur secara wajar yang dapat diterima umum berbentuk kas dan setara kas.



Pendapatan pada umumnya timbul dari kegiatan perusahaan dan sumber pendapatan lainnya. Bagi suatu perusahaan, untuk menentukan suatu kebijakan yang berlaku umum adalah sangat penting dan harus dilaksanakan. Biasanya pendapatan dikaitkan dengan prosedur akuntansi tertentu, jenis nilai tertentu, kaidah - kaidah nilai yang implisit atau yang diasumsikann untuk menetapkan kapan suatu pendapatan harus dilaporkan.

Masalah lain tentang pendapatan adalah penetapan waktu transaksi atau peristiwa ekonomi yang harus diakui sebagai pendapatan. Masalah ini tidak boleh dibatasi dengan definisi tentang pendapatan yang sempit.

Untuk mengatasi hal di atas maka disusunlah Standar Akuntansi Keuangan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar ini berlaku di Indonesia dan merupakan pedoman resmi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan juga memuat tentang pengakuan pendapatan yang dapat mendukung penyajian pendapatan dalam laporan laba rugi agar dapat lebih dipercaya.

Secara teoritik titik waktu dari pengakuan pendapatan dilakukan pada berbagai saat yaitu sebagai berikut :

1. Pengakuan pendapatan sebelum penyerahan

Pengakuan pendapatan diakui sebelum penyerahan biasanya dilakukan oleh perusahaan yang menjalankan kerjasama dengan investor. Pengakuan pendapatan jasa yang dilaksanakan melalui kerjasama investor diatur sebagai berikut :

- a. Pendapatan jasa dari kerjasama diakui sebesar pendapatan sebenarnya untuk periode berjalan sesuai dengan perjanjian kontraktual.
- b. Apabila berdasarkan perjanjian kontraktual :
  - 1) Terdapat kepastian bahwa penyelenggara akan memperoleh suatu aktiva, yang penyerahan kepemilikannya baru dilaksanakan pada akhir masa kerjasama.
  - 2) Perjanjian tersebut dapat dibatalkan (irrevocable)

Pelaporan / pengungkapan pendapatan jasa harus dilaporkan / diungkapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan sesuai dengan SAK ( Standar Akuntansi Keuangan), terutama masalah pengakuan pendapatan jasa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Cara pengakuan pendapatan jasa yang diperoleh melalui kerjasama dan interkoneksi.
- b. Rincian pendapatan jasa yang diperoleh dari pelaksanaan sendiri, kerjasama, dan interkoneksi.

Jadi pendapatan jasa harus dilaporkan tidak hanya sebatas pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan interkoneksi, penyelenggaraan sendiri dan penyelenggaraan kerjasama dengan mitra tetapi juga harus mengungkapkan semua hal - hal yang berhubungan dengan pendapatan yang diperoleh serta cara pengakuannya.

## 2. Pengakuan pendapatan setelah penyerahan

Untuk pengakuan pendapatan pada saat setelah penyerahan umumnya harga pokok produksi ditentukan secara layak pada saat barang telah diselesaikan

diproduksi. Pengakuan pendapatan atas dasar produk selesai dikerjakan biasanya dianggap tepat untuk industri pertambangan termasuk pertanian. Kegiatan produksi merupakan faktor penentu dalam menghasilkan pendapatan dan bukan kegiatan penjualan. Dengan demikian pendapatan dapat diakui berdasarkan banyaknya barang yang benar - benar terjual.

Kriteria utama untuk menggunakan metode ini adalah kemampuan realisasi yang handal dimana produk harus dapat dipasarkan segera pada harga tertentu.

### 3. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan (Penyerahan).

Pengakuan pada saat penjualan sering digunakan karena sebgaiian besar ketidakpastian mengenai proses menghasilkan laba dan harga pertukaran sudah diketahui. Untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi atau barang dagangan, kegiatan penjualan merupakan hal yang paling menentukan dan mempunyai arti keuangan sebab transaksi penjualan mengakibatkan aktiva baru kedalam perusahaan berupa kas atau piutang.

Dalam pengakuan pendapatan pada saat penjualan terkadang bisa timbul masalah yaitu :

- a. Penjualan dengan perjanjian beli kembali merupakan perjanjian pembiayaan produk. Jika mendapat perjanjian beli kembali dengan harga tertentu.
- b. Penjualan dengan hak retur.
- c. Trade loading dan channel stuffing.

Trade Loading merupakan praktik yang ekonomis dan curang dimana melalui praktik ini mencoba menunjukkan penjualan, laba, pangsa pasar

sebenarnya tidak memiliki para pedagang untuk membeli lebih banyak produk daripada dapat mereka jual kembali dengan cepat sedangkan Channel Stuffing dimana produsen ingin membuat hasil – hasil keuangan lebih bagus maka menjual barangnya dengan menawarkan dengan potongan yang besar – besaran agar dapat membeli lebih banyak.

Penjualan bisa dikatakan terjadi dan selesai bilamana terjadi peralihan hak milik atas barang. Dasar pelaporan pendapatan pada saat penjualan :

- (1) Harga jual telah dapat ditentukan dengan pasti.
  - (2) Produk yang dijual diganti dengan asset yang lain.
  - (3) Kebanyakan perusahaan, penjualan merupakan peristiwa keuangan yang paling penting dalam kegiatan ekonominya.
  - (4) Biaya produksi / pengadaan barang tersebut telah dikeluarkan dapat ditentukan dengan mudah.
4. Pengakuan pendapatan diakui pada saat penerimaan kas.

Penerimaan kas merupakan hal yang signifikan dalam pengukuran pendapatan. Penerapan dasar penerimaan kas paling banyak dijumpai dalam perusahaan sebagai berikut :

Perusahaan Jasa.

Untuk perusahaan jasa, jasa yang diberikan itu dalam waktu yang relative pendek seperti angkutan dan bioskop. Saat penerimaan uang dari konsultan / pelanggan biasanya terjadi hampir bersamaan dengan saat pemberian jasa. Dapat dijadikan dasar pengukuran dan pengakuan pendapatan.



Penjualan angsuran.

Penjualan angsuran adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian dimana pembayaran dilaksanakan secara bertahap yaitu:

- a. Pada saat barang diserahkan ke pembeli, penjual menerima sebagian harga penjualan ( Down Payment ).
- b. Sisanya dibayar dengan beberapa kali angsuran.

#### **4. Klasifikasi Dan Kode Rekening**

Dalam akuntansi pertanggung jawaban, biaya dan pendapatan dikumpulkan dan dilaporkan untuk setiap jenjang manajemen. Agar dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan suatu bagan perkiraan yang diberi kode tertentu yang memuat perkiraan - perkiraan yang ada di neraca maupun pada perhitungan laba - rugi. Proses ini mengakibatkan setiap tingkatan manajemen atau setiap bagian dalam perusahaan yang merupakan pusat pertanggung jawaban akan dibebani dengan biaya yang terjadi di dalamnya. Biaya tersebut harus dipisahkan menjadi biaya terkendali dan tidak terkendali berdasarkan kepentingannya di dalam laporan keuangan dan dalam persiapan pembuatan laporan (Putri, 2005).

Untuk memudahkan di dalam proses pengolahan data, rekening - rekening perlu diberi kode karena dengan begitu data akan lebih mudah diidentifikasi. Dalam system akuntansi kode yang digunakan biasanya adalah angka, huruf, atau kombinasi keduanya (Ayuningtyas, 2006).

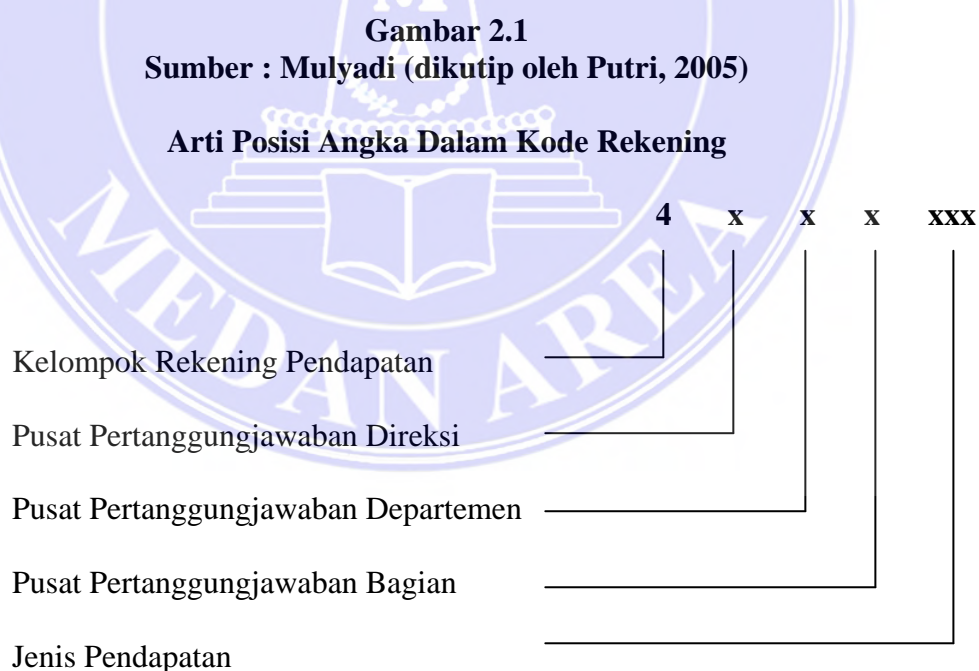
Pemberian kode dapat dilaksanakan dengan cara (Putri, 2005) :

- a. Berdasarkan metode kode kelompok (group code method)

Kode kelompok mempunyai sifat - sifat khusus sebagai berikut :

- 1) Posisi masing - masing angka mempunyai arti, di mana angka yang paling kiri adalah kode golongan perkiraan dan angka paling kanan adalah kode jenis rekening.
- 2) Setiap kode dalam golongan perkiraan terdiri dari angka - angka yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, di mana masing-masing angka mewakili jenis rekening.

Rekening buku besar diberi kode angka dengan metode kode kelompok. Dalam keadaan yang ideal, kode rekening pembantu pendapatan terdiri dari tujuan angka, sehingga cara pemberian kodenya dapat digambarkan sebagai berikut :



b. Kode block (block code)

Kode yang diberikan kepada setiap klasifikasi tidak menggunakan urutan - urutan digit, tetapi dengan memberikan suatu blok nomor untuk setiap kelompok.

Jadi di sini, kode diberikan pada setiap kelompok yang dimulai dengan angka - angka tertentu yang diakhiri dengan angka - angka tertentu juga merupakan suatu blok nomor kode.

Contoh :

Golongan Perkiraan	Nomor Rekening
- Aset ( <i>Assets</i> )	100 - 199
- Utang ( <i>Liabilities</i> )	200 - 299
- Modal ( <i>Capital Funds</i> )	300 - 399
- Pendapatan ( <i>Income</i> )	400 - 499
- Biaya ( <i>Expenses</i> )	500 - 599, dan seterusnya

Sumber : Mulyadi (dikutip oleh Putri, 2005)

### c. Stelsel rekening desimal

Melalui cara ini, perkiraan diklasifikasikan menjadi golongan, kelompok, dan jenis rekening yang jumlahnya masing - masing maksimal 10. Seperti kelompok golongan maupun jenis perkiraan diberi nomor kode mulai dari 0 sampai 9.

### Laporan Pertanggung Jawaban

Laporan pertanggung jawaban merupakan laporan - laporan yang menerangkan hasil dari aplikasi konsep akuntansi pertanggung jawaban yang memegang peranan penting dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan pengawasan atas jalannya operasi perusahaan. Laporan pertanggung jawaban merupakan ikhtisar hasil - hasil yang dicapai oleh seorang manajer bidang pertanggung jawaban dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya selama

periode tertentu. Di dalam pengumpulan atau pelaporan biaya, tiap bidang pertanggung jawaban harus dipisahkan antara biaya terkendali dan biaya tidak terkendali (Putri, 2005).

Laporan pertanggung jawaban harus dinyatakan dalam bentuk yang sederhana. Jika laporan tersebut terlalu kompleks maka manajer akan mengalami kesulitan dalam menganalisis kegiatan operasi perusahaan. Laporan pertanggung jawaban harus menyajikan jumlah anggaran dan jumlah aktual dari pendapatan dan biaya yang dapat dikendalikan. Penyimpangan - penyimpangan yang terjadi harus menjadi perhatian yang penting. Komunikasi regular antara penyaji laporan dengan pengguna laporan pertanggungjawaban harus selalu dilakukan untuk memastikan relevansi dari informasi yang disajikan tersebut. Lebih lanjut, laporan pertanggung jawaban harus diterbitkan dengan dasar waktu yang tepat. Di dalam penyajian laporan pertanggung jawaban selisih yang terjadi antara aktual dengan anggaran harus dianalisis dan diselidiki sebab terjadinya (Ayuningtyas, 2006).

Secara umum, tujuan dari laporan pertanggung jawaban adalah untuk memberikan informasi kepada para pimpinan tentang hasil - hasil pelaksanaan suatu pekerjaan yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya dan memberikan motivasi kepada manajer untuk mengambil satu tindakan dalam upaya meningkatkan hasil.

Agar tujuan manajer pusat pertanggung jawaban tercapai, maka harus diperhatikan lima prinsip dasar penyajian laporan, seperti yang dikemukakan Wilson dan Campbell (dikutip oleh Putri, 2005) adalah :

1. Harus diterapkan konsep “pertanggung jawaban”.



2. Sedapat mungkin harus diterapkan prinsip “pertanggung jawaban”.
3. Secara umum, angka - angka harus dapat diperbandingkan.
4. Sejauh yang dapat dilaksanakan, data harus semakin ringkas untuk jenjang pimpinan yang semakin tinggi.
5. Laporan - laporan pada umumnya harus mencakup komentar - komentar interpretatif atau yang jelas dengan sendirinya.

Disamping lima prinsip di atas, menurut Wilson dan Campbell (dikutip oleh Putri, 2005) ada berbagai faktor lain yang dapat membantu untuk membuat tanggapan atau penerimaan dari pembaca laporan yang lebih baik :

- a) Laporan harus tepat waktu.
- b) Laporan harus sederhana dan jelas.
- c) Laporan harus dinyatakan dalam bahasa dan istilah yang dikenal oleh pimpinan yang akan memakainya.
- d) Informasi harus disajikan dalam urutan yang logis.
- e) Laporan harus akurat.
- f) Bentuk penyajian harus disesuaikan dengan pimpinan yang akan menggunakannya.
- g) Selalu distandarisasikan, apabila mungkin.
- h) Rancangan laporan harus mencerminkan sudut pandang pimpinan.
- i) Laporan harus berguna.
- j) Biaya penyiapan laporan harus dipertimbangkan.
- k) Perhatian yang diberikan untuk penyiapan laporan harus sebanding dengan manfaatnya.

Setiap laporan harus disusun sedemikian rupa sehingga setiap penyimpangan secara jelas ditonjolkan dan mendapat perhatian dari manajer yang bertanggung jawab sehingga ia tidak perlu banyak membaca dan mencari dalam laporan tersebut untuk memperoleh informasi yang diinginkan.

Menurut Mulyadi (1997:190) dasar - dasar yang melandasi penyusunan laporan pertanggung jawaban biaya, yaitu :

1. Jenjang terbawah yang diberi laporan ini adalah tingkatan manajer bagian.

2. Manajer jenjang terbawah diberi laporan pertanggung jawaban biaya yang berisi rincian realisasi biaya dibandingkan dengan anggaran biaya yang disusunnya.
3. Manajer jenjang di atasnya diberi laporan mengenai biaya pusat pertanggung jawaban sendiri dan ringkasan realisasi biaya yang dikeluarkan oleh manajer - manajer yang berada di bawah wewenangnya, yang disajikan dalam bentuk perbandingan dengan anggaran biaya yang disusun oleh masing - masing manajer yang bersangkutan.
4. Semakin ke atas, laporan pertanggung jawaban biaya disajikan semakin ringkas.

Format umum laporan pertanggung jawaban biaya. Laporan pertanggung jawaban biaya berisi informasi berikut (Mulyadi, 1997:85)

- a. Nomor kode rekening biaya.
- b. Jenis biaya atau pusat pertanggung jawaban.
- c. Realisasi biaya bulan ini.
- d. Anggaran biaya bulan ini.
- e. Penyimpangan biaya bulan ini.
- f. Realisasi biaya sampai dengan bulan ini.
- g. Anggaran biaya sampai dengan bulan ini.
- h. Penyimpangan biaya sampai dengan bulan ini.

**Tabel 2.1**  
**Sumber : Mulyadi (1997:191)**

**Format Umum Laporan Pertanggung Jawaban**

Kode Rek.	Jenis / Pusat Pendapatan	Bulan ini			Sampai dengan Bulan ini		
		Realisasi	Anggaran	Peny.	Realisasi	Anggaran	Peny.

## 5. Laporan Laba Rugi

Menurut Charles T Horngren (2006 : 20) mendefinisikan Laporan laba rugi adalah “Laporan laba rugi merupakan ikhtisar atau yang menyajikan rangkuman pendapatan, beban, penghasilan bersih atau kerugian suatu entitas periode tertentu disebut juga laporan pendapatan atau operasi”.

Donal E Kiesso (2002:150) mendefinisikan Laporan Laba Rugi adalah "Merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Informasi tentang kinerja perusahaan, terutama tentang profitabilitas, dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola oleh suatu perusahaan di masa yang akan datang. Informasi tersebut juga seringkali digunakan untuk memperkirakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan kas dan aktiva yang disamakan dengan kas di masa yang akan datang".

Dalam laporan laba rugi diperlukan penggolongan, pengungkapan dan perlakuan atas unsur tertentu sehingga semua perusahaan menyusun dan menyajikan laporan laba rugi berdasar pada basis tertentu. Hal ini akan meningkatkan daya banding laporan keuangan antar periode perusahaan. Standar tentang penggolongan dan pengungkapan pos - pos luar biasa, pengungkapan tentang unsur - unsur tertentu sehubungan dengan laba rugi aktivitas normal, perubahan estimasi akuntansi, kebijakan akuntansi dan perlakuan akuntansi atas kesalahan yang mendasar. (SAK, 2007)

Laporan laba rugi membantu memprediksi arus kas masa depan dengan berbagai cara agar investor dan kreditor dapat diinformasikan untuk :

- a. Mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan.
- b. Memberikan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan.
- c. Membantu menilai resiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan.

## **6. Konsep Laporan Keuangan**

Laporan keuangan yang akurat dapat menghasilkan suatu kejadian atau aktivitas bisnis yang dapat dicatat dengan baik. Kejadian - kejadian tertentu dikenal dengan transaksi yang melibatkan pemindahan dan pertukaran barang atau jasa antara dua entitas atau lebih. Menurut Donald E Kiesso (2002:56) mendefinisikan laporan keuangan "Merupakan cara mengkomunikasikan informasi yang format dan terstruktur agar bisa ditempatkan dalam bagian utama laporan keuangan suatu item harus memenuhi definisi unsur dasar dapat diukur dengan tingkat kepastian yang memadai dan relevan serta handal".

Slamet Sugiri dan Bogat A Riyono (2007:21) mendefinisikan laporan keuangan merupakan "Hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan berbagai pihak".

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena laporan keuangan secara umum menggambarkan keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan. "Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya". (Ikatan Akuntan Indonesia,2007).

Informasi lain biasanya disertakan dalam laporan keuangan termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan perubahan harga. Tujuan dari laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Dari beberapa definisi dan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari akuntansi umum dapat dikatakan lengkap jika yang terdiri dari neraca, laporan perhitungan laba-rugi, laporan perubahan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan, laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.



## 7. Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan

“Kewajaran merupakan hal penting dalam akuntansi karena memberikan jaminan kepada pengguna dan dasar laporan keuangan yang disajikan sudah memadai. Karena arti utama dari kewajaran adalah penyajian secara wajar maka konsep kewajaran kearah pemikiran yang progresif”. (Ahmed R Belkaoui, 2000:201).

Menurut Arthur Andersen dan Co (1960:31) mendefinisikan Kewajaran Laporan Keuangan sebagai berikut : “salah satu dalil akuntansi yang mendasari prinsip - prinsip akuntansi dapat dinyatakan sebagai kewajaran - kewajaran bagi seluruh segmen dari masyarakat bisnis (manajemen, tenaga kerja, pemegang saham, kreditor, konsumen, publik) ditentukan dan diukur dari segi ekonomi serta mode - mode pemikiran dan kebiasaan dari segmen tersebut sampai akhirnya prinsip - prinsip akuntansi dapat menghasilkan akuntansi keuangan bagi hak dan kepentingan ekonomi yang telah diterbitkan secara resmi yang menjadi wajar untuk semua segmen”.

Terdapat anggapan bahwa kewajaran adalah merupakan hal yang objektif karena memiliki dua arti, dan tidak dapat menjadi dasar dari pengembangan teori akuntansi namun ternyata menjadi salah satu tujuan dasar dari akuntansi. Bukti pentingnya hal ini adalah referensi oleh Committee on Auditing Procedures dari American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) sehubungan dengan kewajaran laporan keuangan kriterianya : “penyajian secara wajar dimana sesuai dengan prinsip - prinsip akuntansi yang berlaku umum, pengungkapan, konsisten, dan dapat diperbandingkan serta dalam laporan yang wajar tanpa pengecualian menyajikan secara wajar memiliki konotasi telah mengikuti prinsip - prinsip akuntansi yang berlaku dan standar audit yang berlaku”. (Ahmed R Belkaoui,2006).

Dalam menilai kewajaran laporan keuangan dapat menentukan apakah laporan keuangan sebagai keseluruhan yaitu informasi yang akan dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kewajaran laporan keuangan meliputi : Kepatuhan terhadap Standar akuntansi yang diterima umum (SAK),

laporan keuangan disajikan secara konsisten, tidak ada salah saji material. Kriteria dalam menilai kewajaran laporan keuangan perlu adanya pertimbangan bahwa:

- a. Prinsip akuntansi yang dipilih dan dilaksanakan telah berlaku umum.
- b. Prinsip akuntansi yang dipilih tepat untuk keadaan yang bersangkutan.
- c. Laporan keuangan beserta catatannya memberikan informasi yang cukup dan dapat mempengaruhi penggunaannya, pemahamannya dan penafsiran.
- d. Informasi diklasifikasikan dan diikhtisarkan dengan semestinya, tidak terlalu rinci ataupun terlalu ringkas.
- e. Laporan keuangan mencerminkan peristiwa dan transaksi yang mendasarinya dalam suatu cara yang dapat diterima, yaitu batas-batas yang rasional dan praktis untuk dicapai dalam laporan keuangan.

Pemusatan sumber daya pada hasil adalah pengendalian pendapatan yang terbaik dan paling efektif. Bagaimana pun juga pendapatan tidak terjadi dengan sendiri. Pendapatan selalu dikeluarkan paling tidak dengan maksud tertentu untuk mencapai suatu hasil.

## **B. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang penerapan akuntansi pertanggung jawaban dengan efektivitas peningkatan pendapatan pernah dilakukan oleh Susi Trisnawati dengan hasil bahwa terdapat hubungan yang positif antara penerapan akuntansi pertanggung jawaban dengan efektivitas peningkatan pendapatan. Data penelitian yang digunakan berasal dari data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap 5 hotel yang ada di Kota Tasikmalaya pada tahun 2006, sampel yang

digunakan dalam penelitian terdahulu adalah hotel - hotel yang terdaftar di Dinas Pariwisata Kota Tasikmalaya.

Peneliti terdahulu melakukan penelitian atas dasar ingin mengetahui sejauh mana hubungan antara penerapan akuntansi pertanggung jawaban dengan efektivitas peningkatan pendapatan. Keterbatasan penelitian terdahulu antara lain objek penelitian yang terbatas yaitu hanya pada wilayah Kota Tasikmalaya. Alasan lainnya yaitu kurangnya literatur dari riset - riset terdahulu yang bisa digunakan sebagai acuan yang memadai. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan akuntansi pertanggung jawaban dapat digunakan sebagai alat dalam menunjang peningkatan pendapatan suatu perusahaan. Salah satu data penelitian yang digunakan diperoleh dari hasil lapangan yang diajukan dengan wawancara atas pihak - pihak yang bersangkutan.

### **C. Kerangka Konseptual**

Pada perusahaan yang relatif besar perlu menerapkan akuntansi pertanggung jawaban karena perusahaan semacam ini pada umumnya menetapkan pembagian unit - unit organisasi dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab secara jelas dan tegas.

Semakin kompleksnya kegiatan suatu perusahaan menyebabkan pimpinan tak lagi mampu memantau seluruh kegiatan perusahaan secara langsung. Oleh karena itu, manajemen memerlukan suatu alat bantu pengendalian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya. Untuk melakukan aktivitas perusahaan diperlukan manajer yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang telah menjadi

tanggung jawabnya menurut struktur organisasi yang ada pada perusahaan tersebut. Informasi akuntansi pertanggung jawaban merupakan informasi yang penting dalam proses perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi, karena informasi ini menekankan hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan realisasinya. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara memberikan peran bagi setiap manajer untuk merencanakan pendapatan dan biaya tersebut menurut manajer yang bertanggung jawab.

Setiap manajer harus melaporkan hasil dari perencanaan tersebut supaya dapat dilakukan pengendalian. Laporan berisi tentang perbandingan anggaran dan realisasi yang merupakan alat bantu pengendalian. Semua pendapatan yang terjadi harus dapat dikendalikan pengeluarannya, karena tanpa adanya pengendalian maka jika terjadi penyimpangan terhadap pendapatan dalam perusahaan akan mengakibatkan perusahaan menderita kerugian.

Organisasi yang baik adalah yang terbagi atas pusat - pusat pertanggung jawaban dan setiap manajernya mengetahui wewenang dan tanggung jawab masing - masing. Dalam rangka peningkatan pendapatan, target pendapatan harus disusun sesuai dengan tingkatan manajemen dalam organisasi. Tiap - tiap manajer pusat pendapatan harus mengajukan rancangan target pendapatan untuk pusat pertanggung jawaban yang dipimpinnya.

Salah satu alat untuk mengendalikan penerimaan pendapatan dalam perusahaan adalah akuntansi pertanggung jawaban, karena dalam akuntansi pertanggung jawaban terdapat struktur organisasi perusahaan secara terperinci



sehingga memudahkan pimpinan perusahaan untuk mendelegasikan wewenang kepada manajer yang ada di bawahnya, dan apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan biaya tersebut maka dapat dengan mudah pimpinan perusahaan untuk mencari siapa yang bertanggung jawab atas penyimpangan yang terjadi dalam pendapatan tersebut.

Sebelum sistem akuntansi pertanggung jawaban disusun, harus lebih dahulu dipelajari garis wewenang dan tanggung jawab pembuatan keputusan sehingga dapat ditentukan pusat - pusat pertanggung jawaban yang ada dalam organisasi. Sistem akuntansi pertanggung jawaban dirancang khusus sesuai dengan struktur organisasi untuk dapat menyajikan laporan - laporan prestasi yang berguna dalam menilai sumbangan manajer tingkat pertanggung jawaban tertentu dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Rencana yang telah ditetapkan merupakan komitmen manajemen untuk melaksanakan aktivitas operasi perusahaan sesuai dengan yang telah ditetapkan atau direncanakan.

Dalam rangka peningkatan pendapatan, sistem akuntansi pertanggung jawaban menggolongkan, mencatat, meringkas, dan melaporkan penerimaan pendapatan yang dihubungkan dengan tingkatan - tingkatan manajemen yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendapatan harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan tingkat - tingkat manajemen dalam struktur organisasi. Setiap tingkat manajemen merupakan pusat pendapatan dan akan dibagi dengan pendapatan - pendapatana yang terjadi di dalamnya.

Dengan melihat latar belakang yang telah disampaikan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh akuntansi pertanggung jawaban terhadap pendapatan. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat dilihat dalam bagan berikut:

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Konseptual**

